

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi birokrasi adalah suatu usaha yang dilakukan secara kontinyu yang pada setiap tahapnya mampu memberikan perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Diharapkan dengan adanya reformasi bisa mewujudkan organisasi yang baik, bersih, tertata, tanpa adanya kolusi dan nepotisme (Zulkarnain & Ningrum., 2020). Reformasi membentuk sistem pemerintahan yang baru, yang disebut dengan otonomi daerah. Dimana daerah diamanahkan untuk mengatur serta mengurus sendiri daerahnya (Sutrisno, et al., 2015). Dengan adanya sistem desentralisasi dapat memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah didalam menciptakan daerah dengan otonomi yang luas dan bertanggung jawab, mengatur dan mengurus keperluan rakyat setempat di mana disesuaikan dengan kondisi dan potensi pada wilayahnya (Sunardi, et al., 2019).

Menurut Ombudsman Republik Indonesia (2023) menjelaskan bahwa pada tahun 2019 pelayanan pada Pemerintah Daerah (PEMDA) yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat terutama mengenai perizinan dan pendidikan. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun (2014) dijelaskan bahwa penyelenggaraan untuk urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pemerintahan daerah. Pemerintah mendapatkan tugas dari masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Administrasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan banyak instansi mampu menimbulkan gejolak yang

dapat meningkat berkaitan dengan dengan menyelenggaraan pemerintah daerah (Andani, et al., 2019).

Besarnya anggapan rakyat terhadap pelaksanaan otonomi daerah menjadikan kinerja pemerintah menjadi salah satu hal yang menjadi sorotan. Hal tersebut dikarenakan rakyat yang belum merasakan kinerja pemerintah secara optimal (Putu, et al., 2021). Kesuksesan kinerja pemerintah bisa dinilai dari Pembangunan baik di bidang politik, ekonomi, sosial ataupun budaya. Masyarakat secara umum memberikan penilaian dengan keberhasilan pembangunan infrastruktur sebagai hal yang pokok pada bidang ekonomi. Pembangunan tidak hanya memiliki arti penekanan pada akselerasi dan keberhasilan pada bidang ekonomi, tetapi meliputi juga reorganisasi dan pemutakhiran seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial didalam mensejahterakan masyarakat secara umum (Putu, et al., 2021).

Menurut (Mokodompit, et al., 2021) kinerja merupakan suatu gambaran untuk melihat mengenai tingkat kesuksesan pelaksanaan dari suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi, sasaran yang tertulis pada perencanaan strategi dari suatu organisasi. Kinerja pemerintah dapat dikatakan baik jika dilihat dari kemampuan dalam mencapai hasil yang dilakukan secara nyata dan maksimal (Putu, et al., 2021). Kinerja pemerintah dapat dalam bentuk seperti pelayan publik, resapan anggaran, capaian *output*, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Muslih, et al., 2019). Sedangkan menurut Novitasari, et al (2020) kinerja menggambarkan tentang terdapatnya tingkatan dalam pencapaian dari adanya sistem pelaksanaan yang berkaitan dengan proses, program, kebijaksanaan, rencana, dan kegiatan yang dapat mencapai tujuan yang diharapkan, visi,

misi dan juga sasaran didalam organisasi yang tertulis pada rumusan yang didalamnya terdapat skema strategis pada suatu organisasi.

Indikator yang dapat digunakan dalam melihat dan menilai kinerja dari pemerintah daerah dapat menggunakan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) yang dinilai berdasarkan skor kerjanya, dari 475 kabupaten/kota yang telah menyampaikan tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) tahun 2015, sebanyak 93,8% pemerintah daerah yang telah dinilai kerjanya oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapatkan nilai di atas 2,0 yang memiliki arti tinggi dan sangat tinggi. Penggunaan data tersebut dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah dilakukan selama ini sudah memiliki katogeri baik (Ahyaruddin & Amrillah, 2018). Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (2017) data kinerja pemerintah yang berkaitan dengan bidang pengelolaan juga terus mengalami peningkatan. Hal tersebut memiliki dasar bahwa masih sedikitnya pemerintah daerah yang laporan keuangannya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Yuliani & Agustini, 2016).

Pemerintah Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa pada tahun 2018 kinerja Pemkab Bantul masih kurang baik dari tahun ke tahun, seperti pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dimana Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada masing-masing SKPD masih mendapatkan rating yang kurang baik. Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan yang signifikan, akan tetapi hal tersebut belum termasuk optimal jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya.

Hal tersebut terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satu faktor penyebabnya ialah penyerapan anggaran di Kabupaten Bantul yang masih dirasa kurang

maksimal. Data dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bantul pada tahun 2017 menunjukkan adanya SILPA 2 Milyar lebih dengan persentase penyerapan anggaran 76,21%. Anggaran yang dianggarkan pada tahun 2017 yaitu sejumlah 11.670.087.000 akan tetapi yang terealisasi hanya 8.546.593.450. Hal ini sangat dianggap masih kurang maksimal pada penyerapan anggaran, dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu adanya perbaikan dalam pemerintahannya.

Dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nisa ayat 58 Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab ayat 72 Allah SWT berfirma :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara kontinu oleh pimpinan dan seluruh anggota untuk memberikan keyakinan yang cukup atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan pragmatif, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang undangan (Shinta, et al., 2020). Sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Sistem pengendalian internal dibentuk untuk mengatur kegiatan para anggota dalam badan usaha. Dengan tercapainya sistem pengendalian internal yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan juga kinerja dari para karyawan (Reo, et al., 2021).

Berdasarkan peneliti telah meneliti pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja pada pemerintah daerah. Tetapi terdapat ketidak konsistenan hasil pada penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya ditemukan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Mirnasari & Suardhika, 2018; Mattoasi, et al., 2021; Utama, 2020). Namun, terdapat penelitian lain yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah (Putra et al., 2022; Erawati & Winangsit, 2019).

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dasar dan kualitas kerja yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik. Sedangkan jika kita kaitkan dengan pemerintah daerah, maka kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh aparatur yang berupa pengetahuan, keterampilan, sikap serta perilaku yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya (Zubaidi et al., 2019). Kompetensi dari seorang pegawai harus mampu membantu mengimplementasikan strategi dari organisasi dan dapat membantu dalam berbagai perubahan terhadap manajemen. Kompetensi seseorang yang

bisa membantu dalam sistem kerja berbasis kelompok (Hertati, 2015). Sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mempengaruhi secara langsung dengan kinerjanya yang dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Irafah & Sari, 2020).

Sejumlah peneliti telah melakukan studi tentang dampak kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja di berbagai wilayah di Indonesia. Meskipun demikian, terdapat inkonsistensi dalam temuan hasil penelitian sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ramadhania & Novianty, (2020) dan Putri & Syarief, (2021) ditemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah. Sebaliknya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Pahmi & Busman, (2022) dan Andreana & Suryaningtyas, (2019) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan inkonsistensi hasil diduga ada faktor atau kondisi lain yang mempengaruhi hubungan antara sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja, faktor lain tersebut adalah sistem informasi akuntansi. Hasil rekomendasi penelitian sebelumnya juga menyebutkan penting untuk memasukkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi kinerja (Pahmi & Busman, 2022).

Sistem informasi akuntansi dapat digunakan sebagai faktor penunjang dalam peningkatan kinerja. Menurut Thompson, et al., (1991) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi

dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Meningkatnya kebutuhan informasi tersebut, maka pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan untuk dapat bersaing. Arza et al., (2021) berpendapat bahwa implementasi sistem informasi akuntansi dalam konteks informasi dan teknologi (IT) berfungsi sebagai alat yang diciptakan untuk mendukung pengelolaan dan pengendalian aspek keuangan ekonomi daerah. Sistem informasi akuntansi dapat digunakan untuk mendukung aktivitas rutin pada instansi pemerintah dan memenuhi informasi keuangan yang merupakan suatu kewajiban kepada negara (Chairina & Wehartaty, 2019).

Putu, et al., (2021) mengungkapkan bahwa sistem informasi akuntansi digunakan sebagai peran moderasi karena sistem informasi yang kuat mampu melahirkan peningkatan yang bersaing ditengah kompetisi yang saat ini semakin tinggi. Zaman dimana kemajuan dan perkembangan teknologi sudah semakin baik, instansi pemerintah sudah tidak lagi menggunakan sistem yang kuno, namun berpindah menggunakan sistem yang lebih modern. Adapun kendala yang dirasakan ialah berkaitan dengan *hardware*, *software* yang digunakan dalam pembaharuan data, kondisi sumber daya manusia, dan kendala ini dapat menjadikan penggunaan teknologi informasi menjadi tidak maksimal. Sistem informasi akuntansi dapat berperan dalam memoderasi hubungan antara kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah.

Signifikansi penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan terutama pada akuntansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik dan optimal. Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putu, et al., (2021) dengan

mengganti variabel komitmen organisasi menjadi sistem pengendalian internal sebagai variabel independent dan mengganti penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual menjadi kinerja sebagai variabel dependen. Penggunaan variabel sistem pengendalian internal didasari oleh fenomena pengelolaan izin dan pajak reklame yang belum tertib, dan pengelolaan piutang daerah yang belum memadai di Kabupaten Bantul dan penggunaan kinerja menjadi variabel dependen agar lebih spesifik pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Putu, et al., (2021) dilakukan di Kabupaten Gianyar dengan sampel sebanyak 40 responden, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul dengan sampel Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang terletak di Kabupaten Bantul.

Penelitian ini masih relevan untuk dikaji karena berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bantul dikarenakan masih adanya masalah-masalah yang muncul pada pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan masih sedikitnya penelitian yang mengkaji tentang kinerja dengan sistem pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan adanya inkonsistensi dari hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Dengan Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Moderasi” Studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten Bantul.

Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan gap penelitian diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja di Kabupaten Bantul?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja di Kabupaten Bantul?
3. Apakah sistem informasi akuntansi memoderasi sistem pengendalian internal terhadap kinerja di Kabupaten Bantul?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiri mengenai:

1. Pengaruh positif antara sistem pengendalian internal terhadap kinerja.
2. Pengaruh positif antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja.
3. Pengaruh moderasi sistem informasi akuntansi dalam hubungan sistem pengendalian terhadap kinerja.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu berpartisipasi dalam mengkonfirmasi teori *Agency* dan *Stewardship* dalam memprediksi kinerja. Penelitian ini juga menambah bukti empiris mengenai determinan tentang kinerja pemerintah daerah yang kemudian bisa digunakan sebagai referensi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi kantor BPKAD Kabupaten Bantul agar laporan keuangan menjadi lebih optimal dan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi bagi pengembangan penelitian yang akan datang
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dan menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.